

BUPATI KONAWE

NOMOR: 624 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN/PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI POANAHA KECAMATAN PURIALA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KONAWE

Menimbang

- : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 adalah menata/mengelola penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses/layanan pendidikan dasar bagi anak usia 7-12 tahun periu mendirikan/menegerikan SD yang telah menyelenggarakan kelas jaun
 - c. bahwa umuk maksud butir 'b' diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Swarantara Tingkat se-Sulawesi.
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan/Menegerikan Sekolah Dasar (SD) Poanaha Kecamatan Puriala

Kabupaten Konawe;

KEDUA : Penerimaan Siswa Baru (PSB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum

pertama dimulai pada tahun pelajaran 2013/2014 :

KETIGA : Segala biaya dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut

dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Pada Tanggal UNAAHA 10 Juli 2013

WAKIL BUPATI KONAWE

PARINRINGI, SE.,M.S.

Tembusan:

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I di Jakarta;
- 4. Kepala BKN Wilayah IV di Makassar;
- 5. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
- 6. Direktur Pembinaan SD Dirjend Dikdas Kemendikbud di Jakarta;
- 7. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 8. Ditjend Anggaran Departemen Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
- 10. Pimpinan DPRD Kab. Konawe di Unaaha;
- 11. Kepala Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Konawe di Unaaha;
- 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kab. Konawe di Unaaha;
- 13. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Konawe di Unaaha;
- 14 A.